

Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Perkotaan: Studi pada Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah di Makassar

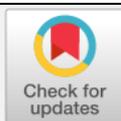
Muhammad Faisal 

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat,
Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
45363, Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Korespondensi: faisalmile69@ipdn.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Faisal, M. (2020). *Empowerment Model for the Poor Communities in Urban Areas: A Study on Low-Income Households in Makassar*. *Society*, 8(2), 517-528

DOI: [10.33019/society.v8i2.180](https://doi.org/10.33019/society.v8i2.180)

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 7 Mei, 2020;

Diterima: 31 Agustus, 2020;

Dipublikasi: 16 Desember, 2020;

ABSTRAK

Upaya pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan masih sangat mendesak saat ini. Meski jumlah masyarakat miskin di perkotaan menurun, angka tersebut tidak signifikan. Pemberdayaan perlu menempatkan masyarakat miskin perkotaan sebagai aktor utama dan pemerintah sebagai fasilitator dan motivator. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran ilmiah tentang penyebab kemiskinan dan model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan strategi naratif. Partisipan penelitian adalah sebanyak lima rumah tangga berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan partisipan. Pengamatan lapangan juga dilakukan terkait kehidupan sosial partisipan dan studi literatur untuk memperkuat data wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan dengan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi / penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tiga faktor penyebab kemiskinan perkotaan: alamiah, budaya, dan struktural. Model pemberdayaan dilaksanakan dengan memahami permasalahan yang dihadapi, menyusun strategi pemecahan masalah, memahami pentingnya melakukan perubahan yang terencana, dan memperkuat kapasitas masyarakat miskin perkotaan.

Kata Kunci: Kemiskinan Perkotaan; Model Pemberdayaan; Pembangunan Ekonomi; Pembangunan Manusia; Penghasilan Rendah

1. Pendahuluan

Tantangan bangsa Indonesia di era otonomi daerah tidaklah mudah. Negara lain saling bersaing dalam meningkatkan daya saingnya. Namun bangsa Indonesia gagal dalam membenahi masalah ekonomi, sosial, dan politik dalam negeri. Di balik itu, ada masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan, yaitu kemiskinan. Kondisi kemiskinan masyarakat Indonesia masih mencapai 9,41 persen pada Maret 2019. Jumlah penduduk miskin di perkotaan 9,99 juta orang, dan di pedesaan 15,15 juta orang pada Maret 2019 (Badan Pusat Statistik, 2019).

Sedangkan jumlah penduduk miskin di kota Makassar sebanyak 66.224 jiwa pada Juli 2019 (Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2019). Meskipun jumlah penduduk miskin perkotaan lebih kecil dari jumlah penduduk miskin pedesaan, menarik untuk diteliti bahwa rumah tangga berpendapatan rendah perkotaan masih dapat bertahan. Mereka tidak merasakan kondisi keterbatasan, dan perilaku kesehariannya terus berlanjut, dan mereka menjalani hidup seperti biasa.

Kondisi ini memprihatinkan, mengingat kemiskinan bukanlah masalah yang mudah diatasi. Pencegahan tersebut mencakup banyak aspek dan proses yang harus dilalui dan dijalankan (Hendrayani et al., 2020, p. 101). Kepemilikan sumber daya yang tidak setara, kapasitas masyarakat yang minim, dan ketimpangan akses dalam produksi menyebabkan partisipasi dalam pembangunan yang lamban. Semua ini, pada gilirannya, menyebabkan perolehan pendapatan yang tidak seimbang dan, pada gilirannya, menciptakan struktur komunitas yang tidak seimbang. Ketimpangan ekonomi ini dapat merusak kesejahteraan pribadi dan sosial dan berpotensi merusak keamanan masyarakat (Ginting & Yusnaini, 2020, p. 4).

Secara umum ada dua faktor utama penyebab kemiskinan dan ketidakberdayaan yang saling terkait: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan masalah dan hambatan yang berasal dari individu atau masyarakat miskin yang bersangkutan, seperti motivasi berprestasi yang rendah, kurangnya modal, penguasaan manajemen yang lemah, dan aspek teknologi. Selanjutnya faktor eksternal terkait dengan kondisi kelembagaan yang belum kondusif. Selain itu, minimnya infrastruktur dan daya dukung lainnya menyebabkan potensi masyarakat kurang berkembang.

Berdasarkan logika penyebab kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat, maka strategi pemberdayaan masyarakat yang akan diterapkan harus menyentuh permasalahan masyarakat, baik dari sisi internal maupun eksternal. Konsep pemberdayaan adalah meningkatkan peran aktif masyarakat (Mustikarini & Santi, 2020, p. 27). Pemberdayaan adalah proses dimana setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai kontrol, pengaruh, peristiwa, dan lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (Kartasasmita, 1996; Sumodiningrat, 2007; Mardikanto & Soebiato, 2013; Soleh, 2014). Inti dari pemberdayaan adalah membahas bagaimana individu, kelompok, dan komunitas berusaha mengendalikan kehidupan dan pekerjaannya sendiri untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginannya. Pelaku pembangunan dituntut untuk secara konsisten dan berkesinambungan menciptakan dan membina kebersamaan sehingga dampaknya tidak hanya pada pemberdayaan di tingkat akar rumput tetapi juga pada penguatan perekonomiannya.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu indikator untuk memberikan posisi kinerja pembangunan (*development output*) yang dicapai suatu daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan daerah tersebut. Untuk kota Makassar,

indeks pembangunan manusia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagai berikut:

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar Tahun 2014 - 2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,35	79,94	80,53	81,13	81,73

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar (2019)

Berdasarkan kriteria United Nations Development Program (UNDP), nilai IPM kurang dari 60 ($IPM < 60$) diklasifikasikan sebagai IPM rendah, nilai IPM 60 - kurang dari 70 ($60 \leq IPM < 70$) diklasifikasikan sebagai IPM sedang, nilai IPM 70 - kurang dari 80 ($70 \leq IPM < 80$) diklasifikasikan sebagai tinggi, dan nilai IPM di atas 80 ($IPM > 80$) diklasifikasikan sebagai IPM sangat tinggi. Berdasarkan kriteria tersebut, IPM kota Makassar sejak tahun 2016 diklasifikasikan sebagai IPM sangat tinggi.

Pencapaian IPM menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat secara umum telah banyak diterapkan di Kota Makassar. Namun di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa rumah tangga berpenghasilan rendah, terutama yang tinggal di gang-gang dan bantaran kanal kota Makassar. Meski telah dilakukan implementasi pemberdayaan melalui berbagai program, namun masyarakat gang tersebut masih terlihat terbelakang dan miskin. Misalnya, masih banyak permukiman kumuh. Selain itu, masih adanya masyarakat miskin yang bekerja sebagai tukang becak/ojek, pembantu rumah tangga, pemulung, dan pedagang kaki lima. Pekerjaan itu telah berlangsung lama dan dari generasi ke generasi.

Selain itu, mereka juga memiliki banyak anak dan tidak dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga sulit bagi anaknya untuk mendapatkan jenis pekerjaan yang lebih baik. Kondisi tersebut yang memaksa anak-anaknya untuk tetap melanjutkan pekerjaan orang tuanya dan membawa konsekuensi lebih lanjut, sulitnya keluar dari siklus kemiskinan. Mereka bahkan tidak merasa miskin dan mengarah pada kemiskinan struktural dan kemiskinan budaya (Hakim, 2019, p. 165). Selain itu, masyarakat gang juga identik dengan kondisi kumuh, temperamen tinggi, sering bekerja sebagai pelayan/wiraniaga/buruh karena tidak mau mengambil resiko kerja, dan pemahaman nilai-nilai agama yang rendah sehingga berujung pada tindak pidana.

Di sisi lain, dari pra-kunjungan lapangan juga ditemukan bahwa sikap dan perilaku malas mereka menjadi penyebab kondisi kemiskinan mereka. Penelitian pendahuluan memperoleh informasi tentang banyaknya pusat bisnis yang ada di kota Makassar, seperti Mal Makassar, Pasar Butung yang dikenal sebagai pusat perbelanjaan grosir, Karebosi Link, Condotel Karebosi, dan lain-lain. Kemiskinan perkotaan bersifat paradoks. Masyarakat kini semakin terinformasi dan kritis serta dapat menyaring dunia usaha yang berkembang (Kurniasari, 2015, p. 99). Padahal, dalam situasi yang terinformasi dan dunia bisnis yang berkembang ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses jenis pekerjaan dan kemudian mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Semakin banyak bisnis komunitas berkembang, semakin banyak pendapatan yang mereka hasilkan (Layyinaturrobaniyah, 2019, p. 141).

Di sisi lain, secara struktural, berbagai pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Makassar dan perusahaan melalui program *Corporate Social*

Responsibility (CSR), termasuk pemberdayaan masyarakat oleh lembaga sosial. Namun demikian, kegiatan pendampingan, terutama yang berasal dari lembaga sosial, tidak berkelanjutan dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Begitu pula dengan program bantuan perusahaan yang mengutamakan kepentingan citra perusahaan. Sedangkan hasil kegiatan pemberdayaan dari Pemerintah Kota Makassar masih belum optimal. Program bantuan sosial tidak hanya sekedar donasi tetapi juga harus mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin untuk mencapai kemandirian masyarakat (Lestari et al., 2019, p. 290). Berbagai kegiatan pemberdayaan mengakibatkan ketergantungan masyarakat pada program pemberdayaan. Pemberdayaan tidak mencakup hal-hal yang mendasar, misalnya nilai-nilai masyarakat, seperti cepat puas dengan keadaan atau tidak memiliki motivasi untuk sukses.

Menurut McClelland (1987, p. 13), kemajuan bisnis di bidang ekonomi tidak terjadi di negara berkembang karena masyarakat di negara tersebut belum memiliki mentalitas yang sesuai untuk pembangunan. Menurut McClelland (1987, p. 13), masyarakat di negara berkembang tidak memiliki apa yang disebut n-Ach (*Need For Achievement*). Salah satu alasan kurangnya n-Ach adalah karena mereka cenderung menyelesaikan masalah mereka hingga takdirnya. Teori ini menjelaskan perlunya pemberdayaan yang dilakukan di tingkat eksternal, dan yang signifikan adalah penyediaan kekuatan dengan mengubah faktor internal masyarakat miskin perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan dan penyebab kemiskinan mereka.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Inti esensi konseptualisasi pemberdayaan adalah pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia, dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normatif, struktural, dan substansial. Pemberdayaan tersirat memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat berdasarkan aspek demokrasi, dengan fokus pada lokalitas. Orang akan merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal (Bebbington, 2000, p. 8). Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang. Jadi intinya adalah setiap manusia memiliki potensi untuk berkembang. Tidak ada manusia yang lengkap tanpa kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya membangun kekuatan itu dengan mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensinya serta berupaya mengembangkannya untuk mencapai tujuan akhir, yaitu masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Kedua, memperkuat potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat (pemberdayaan). Selain menciptakan iklim dan atmosfer, ada kebutuhan untuk mengambil langkah konkret. Ini melibatkan pemberian berbagai masukan dan pembukaan akses ke peluang yang akan membuat masyarakat berdaya. Oleh karena itu, upaya terpenting adalah meningkatkan status pendidikan dan kesehatan serta akses terhadap sumber kemajuan ekonomi seperti permodalan, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. *Input* berupa pemberdayaan, terkait dengan pembangunan prasarana dan sarana fisik yang diperlukan, seperti irigasi, jalan, listrik, dan pelayanan sosial (pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan), untuk menjangkau masyarakat di tingkat paling bawah, sebagai serta ketersediaan dana, pelatihan, dan lembaga pemasaran, di mana populasi terkonsentrasi kurang dalam pemberdayaan. Oleh karena itu, perlu adanya program khusus bagi masyarakat kurang mampu karena program umum yang berlaku tidak selalu dapat menjangkau lapisan masyarakat.

Ketiga, memberdayakan berarti melindungi. Proses pemberdayaan bertujuan agar masyarakat tidak menjadi lemah dan tidak berdaya. Perlindungan dan keberpihakan terhadap

yang lemah merupakan hal mendasar dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang. Dalam konteks penelitian ini, melindungi dapat berarti mengadvokasi masyarakat yang relatif kurang beruntung.

2.2. Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Ukuran kemiskinan secara umum terdiri dari kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut terkait dengan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk kehidupan yang layak. Konsep yang berkembang di Indonesia ini mengacu pada "ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar" (Mawartahadi, 2005, p. 97). Definisi ini mengacu pada standar kemampuan minimum tertentu, yang artinya orang yang tidak dapat melebihi kemampuan minimum dianggap sebagai orang miskin. Penyebab kemiskinan adalah hubungan sebab akibat yang kompleks dan saling terkait dari ketidakberdayaan, kerapuhan, kelemahan fisik, kemiskinan, dan keterasingan. Pengentasan kemiskinan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat agar mandiri dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, semakin tinggi akses ekonomi, semakin besar peluang mereka untuk mandiri dalam mengatasi masalah kemiskinan (Chambers, 1995).

Sedangkan jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan terdiri dari (1) kemiskinan alamiah, (2) kemiskinan budaya, dan (3) kemiskinan struktural (Sumodiningrat, 1998, p. 27). Kemiskinan alamiah merupakan kondisi kemiskinan yang terjadi karena sedari awal merupakan orang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, atau sumberdaya pembangunan yang memadai. Kalaupun berpartisipasi dalam pembangunan, mereka hanya mendapat kompensasi pendapatan rendah. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alam seperti kecacatan, penyakit, usia tua, atau bencana alam. Menurut Kartasasmita (1996, p. 235), kondisi kemiskinan seperti ini adalah "Kemiskinan Persisten"; kemiskinan yang sudah kronis atau turun-temurun.

Kemiskinan budaya merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena budaya, atau adat istiadat yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Kemiskinan budaya mengacu pada sikap hidup seseorang atau sekelompok orang yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup, dan budaya dimana mereka merasa sudah cukup dan tidak merasa dirugikan. Kelompok masyarakat seperti itu tidak mudah untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan tidak ingin memperbaiki dan mengubah hidup mereka. Akibatnya, tingkat pendapatan mereka rendah sesuai standar yang biasa digunakan. Penyebab kemiskinan disebabkan oleh faktor budaya seperti kemalasan, tidak disiplin, boros, dan lain-lain.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi, serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Upaya penanggulangan kemiskinan alam dengan merencanakan berbagai program dan kebijakan menyebabkan munculnya kemiskinan struktural. Namun karena implementasi yang tidak merata, kepemilikan sumberdaya yang tidak merata, peluang yang tidak merata menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi tidak merata dan mengakibatkan timpangnya struktur masyarakat.

Faktor penyebab kemiskinan masyarakat, menurut Remi & Tjiptoherijanto (2002, p. 1) adalah melebarnya ketimpangan pendapatan. Pengeluaran keluarga yang besar, pekerjaan yang tidak layak dan tidak memadai, serta tingkat pendidikan yang rendah merupakan ciri-ciri rumah tangga berpenghasilan rendah yang terkait dengan kemiskinan masyarakat. Rumah

tangga berpenghasilan rendah cenderung memiliki anggota keluarga dalam jumlah besar dan cenderung memiliki angka kelahiran yang tinggi. Angka kematian anak pada rumah tangga berpenghasilan rendah juga relatif tinggi karena kurangnya pendapatan dan akses terhadap kesehatan dan pemenuhan gizi anak mereka. Dengan demikian, banyaknya anggota keluarga dapat menghambat peningkatan sumber daya manusia di masa depan, khususnya anak-anak. Anak dalam kondisi ini akan sulit keluar dari kemiskinan dan cenderung menjadi pewaris kemiskinan dari orang tuanya.

Diperlukan upaya untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan di berbagai sektor penanggulangan kemiskinan. Menurut Sumodiningrat (1998, p. 38), kebijakan pengentasan kemiskinan dikategorikan menjadi dua, yaitu kebijakan tidak langsung dan kebijakan langsung. Kebijakan tidak langsung meliputi 1) upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. 2) pengendalian penduduk, dan 3) pelestarian lingkungan dan penyiapan kegiatan pelatihan bagi masyarakat miskin. Sedangkan kebijakan langsung meliputi 1) pengembangan data primer dalam penetapan kelompok sasaran. 2) menyediakan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan). 3) penciptaan lapangan kerja. 4) program pembangunan daerah, dan 5) pelayanan kredit.

Upaya penanggulangan kemiskinan harus menjadi pilihan strategi untuk memperkuat peran dan posisi ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia (Sumodiningrat, 1998, p. 43). Program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomiannya. Pelaksanaan langkah-langkah strategis dalam program ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat miskin terhadap sumber daya pembangunan dan membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan untuk mengatasi keterbelakangan mereka. Selain itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus bertumpu pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pemahaman yang jelas tentang penyebab masalahnya.

Ada tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin: Pertama, pendekatan terarah artinya pemberdayaan masyarakat harus diarahkan, yaitu berpihak pada masyarakat miskin. Kedua, pendekatan kelompok, artinya bersama-sama memfasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi. Ketiga, pendekatan pendampingan, artinya dalam proses pembentukan dan pengorganisasian masyarakat miskin perlu didampingi oleh fasilitator profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat pencapaian kemandirian (Soegijoko & Kusbiantoro, 1997; Sumodiningrat, 2009; Mardikanto & Soebiato, 2013). Selain itu, Fadilah *et al.* (2019) mengemukakan tahapan-tahapan pemberdayaan sosial masyarakat, yaitu: tahapan pembinaan mental, tahapan kegiatan kelompok, dan tahapan kegiatan peningkatan kapasitas. Terwujudnya strategi pembangunan baru berupa 1) keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat, 2) penguatan otonomi dan desentralisasi, dan 3) modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat (Sumodiningrat, 2007, p. 110). Untuk merealisasikan arah pembangunan yang baru, pemerintah perlu mempertajam strategi pembangunan dengan memperkuat kelembagaan pengembangan masyarakat dan birokrasi. Penguatan kelembagaan melalui model pembangunan partisipatif bertujuan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dan kemampuan aparatur birokrasi dalam menjalankan fungsi kelembagaan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat (*good governance*), bukan kepentingan otoritas.

Beberapa alternatif strategi pemberdayaan masyarakat miskin antara lain 1) strategi yang ditujukan langsung untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat, seperti mengatasi masalah

kekurangan pangan dan gizi pada balita dan ibu menyusui dengan menyediakan sembako yang sesuai atau murah gratis. 2) mengarahkan untuk memproduksi bahan makanannya seperti beras atau jagung. 3) strategi peningkatan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal di suatu daerah. 4) strategi yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi agroekosistem yang rusak dan tidak sehat. 5) strategi untuk memperbaiki tatanan masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya dan masyarakat, secara luas dalam pengertian yang lebih umum (Pranadji, 2003; Mardikanto & Soebiato, 2013; Hikmat, 2013). Strategi pemberdayaan perlu mengambil langkah-langkah yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dengan menggunakan pendekatan komunikasi yang memungkinkan masyarakat memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya, memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan mengekspresikan diri secara terbuka satu sama lain (Nugroho *et al.*, 2016, p. 255).

3. Metodologi Penelitian

3.1. Strategi Penelitian

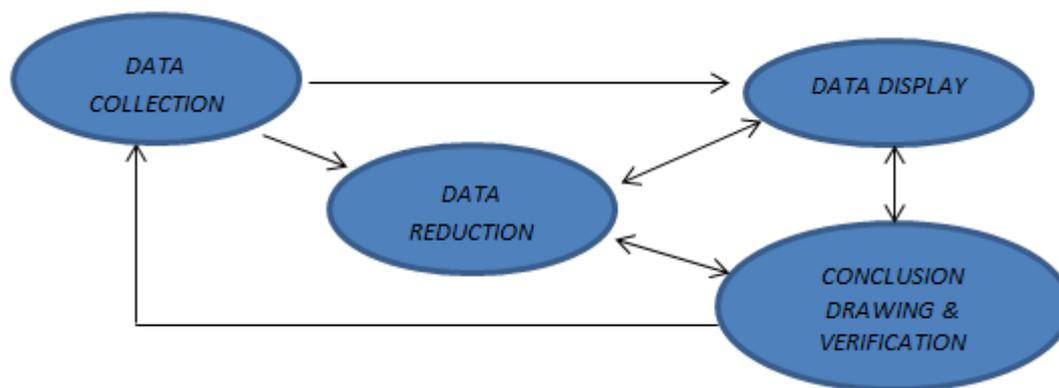
Ada lima strategi penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Creswell (2010, pp. 20-21), etnografi, teori dasar, studi kasus, fenomenologi, dan naratif. Penelitian ini menggunakan strategi naratif. Menurut Creswell (2010, p. 21), naratif adalah strategi penelitian untuk menyelidiki kehidupan individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupannya. Strategi naratif dirasa cocok untuk digunakan karena peneliti menyelidiki kehidupan rumah tangga berpenghasilan rendah di perkotaan dan meminta mereka untuk menceritakan kehidupan mereka. Kemudian peneliti menggabungkan pandangan tentang kehidupan partisipan dengan pandangan tentang kehidupan peneliti.

3.2. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka dan dokumen. Lokasi penelitian di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, dengan subjek penelitian adalah 5 rumah tangga berpenghasilan rendah perkotaan. Partisipan dipilih dengan sengaja dan penuh pertimbangan, terdiri dari DG, usia 64 tahun, penyandang disabilitas (kaki lemah), dan tidak bisa berjalan. HS, 40 tahun, dan MF, 45 tahun, bekerja sebagai pekerja konstruksi dengan pendapatan rendah. MS, 30 tahun, dan HG, 50 tahun, bekerja di sektor informal sebagai pedagang kaki lima dan dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi penelitian. Dalam observasi ini peneliti mencatat aktivitas para partisipan di lokasi penelitian. Selain itu, studi literatur dan dokumen juga dipelajari untuk memperkuat data dari wawancara dan observasi.

3.3. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang sedang berlangsung, berulang, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara bersamaan. Prosesnya bersifat siklis, bukan linier. Oleh karena itu, analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikenal dengan teknik tiga arah, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi/penarikan kesimpulan (*conclusion drawing & verification*) (Miles & Huberman, 1992, p. 20; Bungin, 2015, p. 69), sebagai berikut:



Gambar 1. Komponen Analisis Data Model Interaktif

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin yang tinggal di gang-gang dan bantaran kanal kota Makassar cenderung memiliki sifat pemalas. Mereka tidak memiliki dorongan untuk sukses. Bantuan masyarakat miskin, baik dari pemerintah kota maupun perusahaan yang merupakan bagian dari program tanggung jawab sosialnya, tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dari tahun 1995 sampai dengan 1999 meliputi Program Pembangunan Daerah, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi, Program Pengembangan Masyarakat Pemerintah Daerah, dan Kelompok Usaha Bersama. Demikian pula, mulai tahun 2007, Program Pemberdayaan Masyarakat Nasional (PNPM) Mandiri Nasional terdiri dari dua program utama: Program Pembangunan Kabupaten dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.

Periode 2014-2019, Walikota Makassar Ir. Ramdan Pamanto, dan Wakil Walikota Makassar, Dr. Syamsu Risal, M.Sc., membuat berbagai kebijakan atau program pemberdayaan masyarakat yang disebut Badan Usaha Lorong (BULO) dengan mengadopsi sistem koperasi. Tujuan utama program ini adalah mendorong pembangunan dan produktivitas sekitar 7.520 gang di kota Makassar untuk melanjutkan masterplan restorasi gang di kota Makassar. Selain itu ada bantuan dari Pemerintah Kota, antara lain Program Beras Sejahtera (Program Beras Bersubsidi), Bantuan Langsung Tunai (Program Bantuan Tunai), Program Keluarga Harapan (Program Keluarga Harapan), bantuan bergulir dan modal berkelanjutan, dan pembentukan Bank Sampah di berbagai desa untuk pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan. Pada model Bank Sampah, lembaga simpan pinjam juga secara eksplisit dibentuk untuk nasabah Bank Sampah. Tujuan akhir dari program ini adalah menjadikan masyarakat miskin mandiri. Sekalipun program tersebut tidak lagi berkelanjutan atau berakhir, masyarakat sasaran dapat melanjutkan usahanya.

Program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan bersumber langsung dari pemerintah kota dan Bank Indonesia melalui program keuangan mikro dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Pembangunan Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Perubahan struktur secara alamiah merepresentasikan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Perubahan struktural dapat terjadi jika kapasitas lokal meningkat secara signifikan, dan kesejahteraan meningkat secara bertahap dan berkelanjutan. Pada kenyataannya, jumlah penduduk miskin tidak

berkurang dan jenis pekerjaannya juga tidak berubah. Perubahan struktur dan peningkatan kapasitas lokal yang signifikan merupakan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

Wawancara dengan partisipan menunjukkan bahwa mereka pernah mendapat bantuan dari Pemerintah Kota yang berupa dana modal atau beras namun masih dalam kemiskinan. Upaya kesejahteraan sosial ini hanya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup jangka pendeknya. Jika program ini terus berlanjut, maka akan menciptakan ketergantungan pada kelompok sasaran. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengintegrasikan program pendampingan dengan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai intervensi seperti peningkatan keterampilan komunikasi, kepercayaan diri, motivasi, kemandirian, menjalin hubungan sosial, dan membangun jejaring.

Selain itu, perlu dibentuk organisasi lokal atau kelompok sejenis untuk melakukan perubahan, baik secara legal maupun formal, dan peningkatan kesadaran, kapasitas, pengelolaan pelayanan sosial, dan pendidikan nonformal. Hasil wawancara mendalam dengan partisipan menunjukkan bahwa partisipan tidak tergabung dalam organisasi manapun. Tidak ada transfer pengetahuan. Mereka masih memandang program bantuan pemerintah kota sebagai program bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Sedangkan tingkat pendidikan dan keterampilan mereka rendah. Kondisi ini mencerminkan perlunya pergeseran peran pemerintah kota yang signifikan, dari penyedia layanan sosial menjadi fasilitator, mediator, koordinator, penggerak, dan pendidik. Tujuannya agar masyarakat miskin perkotaan sebagai kelompok sasaran dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya secara signifikan. Sementara itu, diperlukan pembinaan kepada organisasi lokal seperti lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya untuk bertindak sebagai agen perubahan bagi kelompok miskin atau rentan.

Jenis kemiskinan pada lima partisipan penelitian yaitu kemiskinan alam, kemiskinan budaya, dan kemiskinan struktural. Penyebab kemiskinan alami bagi salah satu partisipan adalah ketidakmampuan memperoleh kehidupan yang layak karena disabilitas dan kelemahan fisik. Salah satu partisipan, DG, 64 tahun, menjadi pengemis karena cacat dan lemah fisik. DG selalu menerima bantuan dari pemerintah kota melalui Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Strategi pemberdayaan ini sangat cocok bagi mereka yang hanya mengandalkan program bantuan untuk bertahan hidup.

Dua partisipan lainnya termasuk dalam kategori kemiskinan budaya. Dilihat dari kondisi fisik, HS, 40 tahun, dan MF, 45 tahun yang berprofesi sebagai kuli bangunan, partisipan harus rajin bekerja dan bertingkah laku hemat. Budaya malas mereka membuat sumber daya di lingkungan mereka tidak dapat digunakan. Mereka belum dapat menggunakan waktu secara baik selama bekerja sebagai kuli bangunan. Mereka hanya bekerja empat hari dalam seminggu sehingga penghasilannya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan tidak ada yang ditabung untuk masa depan mereka. Mereka puas dan senang dengan penghasilan yang mereka terima.

Partisipan lainnya adalah MS, 30 tahun, dan HG, 50 tahun. Kedua partisipan bekerja di sektor informal dengan tingkat pendidikan rendah dan menjalankan usaha sebagai pedagang kaki lima. Status pendidikan mereka yang rendah menyebabkan mereka memiliki lebih sedikit kesempatan dan dikategorikan dalam kemiskinan struktural. Akses ke sumber modal minim. Mereka mengaku mendapat bantuan modal dari bank tapi kesulitan mengembalikan pinjaman karena kalah bersaing dengan pemilik modal yang lebih besar. Selain itu, mereka memiliki keterampilan yang rendah dalam mengelola suatu usaha yang berakibat pada rendahnya pendapatan mereka. Setiap jenis kemiskinan tentunya membutuhkan model atau strategi pemberdayaan yang sesuai dengan situasi yang dialami kelompok sasaran.

Model atau strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan kesadaran akan keadaan yang dialami. Tanpa melalui proses penyadaran, sulit bagi mereka untuk mengenali masalahnya, termasuk kesulitan mencari solusi. Wawancara dengan partisipan memperoleh informasi bahwa mereka pernah mendapatkan kegiatan peningkatan kesadaran tetapi terbatas pada penyuluhan. Namun, proses penyadaran bisa juga melalui pendidikan dan pelatihan.

Tahap selanjutnya adalah memahami kelompok sasaran. Telah terjadi kesenjangan antara kondisi yang ada (kenyataan) dengan kondisi yang diharapkan. Pada tahap ini dilakukan pemahaman tentang berbagai faktor penyebab masalah, yang terdiri dari kondisi sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan dan aksesibilitas, serta lingkungan sosial budaya dan politik, termasuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dengan menganalisis kedua faktor tersebut.

Tugas pemerintah kota sebagai fasilitator adalah membantu mereka menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka, menganalisis peluang dan tantangan, serta merumuskan alternatif yang tepat untuk menyelesaikan masalah mereka. Sebagai fasilitator, pemerintah kota membantu masyarakat miskin menyelesaikan permasalahan dan memberikan berbagai pertimbangan risiko yang akan dihadapi. Hidup adalah perubahan. Oleh karena itu, penting untuk menunjukkan kepada kelompok sasaran pentingnya perubahan. Disadari atau tidak, perubahan selalu terjadi setiap saat baik itu perubahan lingkungan alam maupun lingkungan sosial ekonomi, budaya, dan politik, baik di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan global. Oleh karena itu kepada masyarakat miskin perlu ditunjukkan pentingnya melakukan perubahan yang direncanakan dan mempersiapkan diri untuk mengantisipasi setiap perubahan.

Sedangkan perencanaan untuk perubahan membutuhkan pengujian agar perubahan yang dilakukan dapat menjadi solusi dari permasalahan. Perubahan harus mengikuti kondisi masyarakat saat ini. Hasil uji coba perubahan merupakan informasi penting bagi kelompok sasaran. Langkah selanjutnya adalah memperkuat kapasitas dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada kelompok sasaran untuk menyampaikan ide-ide kreatif terkait aksesibilitas informasi, permodalan, dan pemenuhan kebutuhan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pertanggungjawaban suatu kegiatan.

4.2. Penentu Kemiskinan Perkotaan

Hasil observasi dan wawancara dengan partisipan diperoleh informasi bahwa selain faktor alam yaitu ketidakmampuan memperoleh kehidupan yang layak akibat disabilitas dan kelemahan fisik, terdapat dua faktor lain yang menjadi penyebab kemiskinan perkotaan yaitu faktor budaya dan faktor struktural. Faktor budaya yang paling dominan adalah kemalasan bekerja dan kurangnya motivasi berprestasi (*n-Ach*). Kepuasan atas pencapaian dan kebahagiaan dengan keadaan atau status mereka saat ini membuat mereka tetap dalam kemiskinan. Individu yang memiliki *n-Ach* tinggi akan berkinerja baik jika berada dalam situasi kerja. Dengan memiliki motivasi berprestasi (*n-Ach*) maka terbuka lebar untuk keluar dari kemiskinan. Ciri lain partisipan tidak bekerja maksimal. Kesempatan bekerja tujuh hari dalam seminggu tetapi hanya bekerja empat hari dalam seminggu menunjukkan bahwa mereka tidak bekerja secara maksimal. Pendapatan yang diperoleh hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak memperhitungkan menabung untuk masa depan.

Selain itu, tingkat pendidikan partisipan penelitian juga rendah. Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan rendahnya tingkat keterampilan yang berakibat pada terbatasnya pilihan pekerjaan. Pilihan pekerjaan mereka hanya di sektor informal, seperti pedagang kaki lima dan pedagang asongan. Di sisi lain, modal usaha mereka berasal dari pinjaman bank. Persaingan usaha yang ketat, keterampilan manajemen usaha yang rendah, dan kewajiban membayar pinjaman modal juga menjadi faktor penyebab mereka tetap berada dalam kemiskinan.

5. Kesimpulan

Model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan meliputi penyadaran kepada masyarakat miskin dalam penyuluhan, mempertegas kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi nyata serta faktor penyebabnya, menganalisis kekuatan dan kelemahan, memahami pentingnya perubahan, dan memperkuat kapasitas kelompok sasaran. Sebagian masyarakat yang tinggal di gang-gang dan di bantaran kanal kota Makassar tetap miskin meski pemerintah memberikan beberapa program pemberdayaan karena malas bekerja dan cenderung menyerah. Selain itu, mereka juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan keterampilan yang kurang sehingga sulit untuk mencari pekerjaan yang dapat menunjang mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi dasar awal penelitian selanjutnya untuk mengkaji penyebab masyarakat miskin tidak mampu mandiri dan keluar dari kemiskinan serta mengkaji peran pemerintah kota dalam mengentaskan kemiskinan perkotaan.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Bebbington, A. (2000). Development is more than just growth. *Development Outreach*, 2(3), 7-10.
- Badan Pusat Statistik. (2019, July 15). Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2019). *Kota Makassar Dalam Angka 2019* (Catalog: 1102001.7371). Retrieved from <https://makassarkota.bps.go.id/publication/2019/08/16/4ca03301b8e2b8414e33f6a3/kota-makassar-dalam-angka-2019.html>
- Bungin, B. (2015). *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta, Indonesia: PT RajaGrafindo Perkasa.
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173-204. <https://doi.org/10.1177/095624789500700106>
- Creswell, J.W., (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.

- Fadilah, S., Maemunah, M., & Hernawati, N. (2019). Community Social Empowerment in Zakat Community Development (ZCD). *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 35(2), 460–470. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i2.5127>
- Ginting, E., & Yusnaini, Y. (2020). Social Inequality among the Female Merchants of Ethnic Malay and Chinese. *Society*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.126>
- Hakim, M. (2019). Fatalism and Poverty in Fishing Communities. *Society*, 7(2), 150–158. <https://doi.org/10.33019/society.v7i2.118>
- Hendrayani, Y., Maryam, S., & Uljanatunnisa, U. (2020). CSR Partnership Model for Sustainable MSMEs Development: A Case Study of the Partnership Program at PT Jasa Marga (Persero) Tbk. *Society*, 8(1), 94–108. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.134>
- Hikmat, H. (2013). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Revisi ed.). Bandung, Indonesia: PT Humaniora Utama Press.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta, Indonesia: PT Pustaka Cidesindo.
- Kurniasari, N. D. (2015). Program CSR berbasis pemberdayaan masyarakat (untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil menengah di Madura). *Neo-Bis*, 9(1), 98–109. Retrieved from <https://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/view/685>
- Layyinaturrobaniyah, L. (2019). Lembaga Keuangan Mikro dan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang. *Sosiohumaniora*, 21(2), 140–143. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i2.19516>
- Lestari, W., Kartono, D. T., Demartoto, A., & Setiyawan, K. B. (2019). The Empowerment of Households towards Independence through Social Capital in Program Keluarga Harapan (PKH). *Society*, 7(2), 268–280. <https://doi.org/10.33019/society.v7i2.124>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung, Indonesia: CV Alfabeta.
- Mawartahadi. (2005). *Evaluasi atas kebijakan Program Beras Bagi Keluarga Miskin dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Gunungkidul :: Di Kecamatan Wonosari* (Master's dissertation). Universitas Gadjah Mada. Retrieved from http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/29070
- McClelland, D. C. (1987). *Memacu Masyarakat Berprestasi: Mempercepat Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Motif Berprestasi*. Jakarta, Indonesia: CV Intermedia.
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta, Indonesia: Universitas Indonesia Press.
- Mustikarini, E. D., & Santi, R. (2020). The Empowerment Strategy of Newly Irrigated Rice Field Farmers through LEISA. *Society*, 8(1), 23–36. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.143>
- Nugroho, D. R., Hubeis, A. V. S., Saleh, A., & Priatna, W. B. (2016). Model of Communication : Corporate Social Responsibility (CSR) to Empower Communities. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 32(2), 254–266. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v32i2.1845>
- Pranadji, T. (2003). Penajaman Analisis Kelembagaan Dalam Perspektif Penelitian Sosiologi Pertanian dan Pedesaan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 21(1), 12–25. <https://doi.org/10.21082/fae.v21n1.2003.12-25>
- Remi, S. S., & Tjiptoherijanto, P. (2002). *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia: Suatu Analisis Awal*. Jakarta, Indonesia: PT Rineka Cipta.
- Soleh, C. (2014). *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung, Indonesia: CV Fokusmedia.

- Soegijoko, B. T. S., & Kusbiantoro, B. S. (Eds.). (1997). *Bunga Rampai: Perencanaan Pembangunan di Indonesia* (Mengenang Prof. Dr. Sugijanto Soegijoko ed.). Jakarta, Indonesia: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sumodiningrat, G. (1998). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Sumodiningrat, G. (2007). *Pemberdayaan Sosial Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta, Indonesia: PT Kompas Media Nusantara.
- Sumodiningrat, G. (2009). *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Indonesia: PT Elex Media Komputindo.

Tentang Penulis

Muhammad Faisal, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Negeri Makassar, Indonesia, pada tahun 2012. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia.

E-Mail: faisalmile69@ipdn.ac.id